

**PENGARUH PENILAIAN GCG DAN JUMLAH DPS TERHADAP
FINANCIAL DISTRESS BANK UMUM SYARIAH YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2016 -2018 DENGAN
MODEL BANKOMETER**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**ELY KUSMIYATI
NPM : 1651020566
Jurusan : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

**PENGARUH PENILAIAN GCG DAN JUMLAH DPS TERHADAP
FINANCIAL DISTRESS BANK UMUM SYARIAH YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2016 -2018 DENGAN
MODEL BANKOMETER**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**ELY KUSMIYATI
NPM : 1651020566
Jurusan : Perbankan Syariah**

Pembimbing I : Prof. Tulus Suryanto, M.M, Akt. CA.

Pembimbing II : M. Yusuf Bahtiar, M.E.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Bank Umum syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Bank syariah dalam menjalankan dua aktivitas besar, harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku. Eksistensi bank syariah saat ini kian populer, sebagai lembaga keuangan yang memiliki wewenang melakukan banyak aktivitas, bank syariah dihadapkan pada berbagai macam risiko yang melekat. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi sedini mungkin. Berbagai risiko tersebut bisa berupa penurunan tingkat kesehatan bank syariah hingga risiko kebangkrutan. Perkembangan industri perbankan syariah yang salah satunya ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam industri perbankan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. *Good corporate governance* menjadi salah satu faktor atau variabel yang digunakan dalam memprediksi *financial distress* suatu bank. Di Indonesia diterapkan sistem dimana dalam suatu bank terdapat dua pengawasan, akan tetapi pada bank syariah terdapat tiga diantaranya Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). *Financial Distress* dalam penelitian ini menggunakan model prediksi yaitu model Bankometer. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penilaian GCG dan jumlah DPS terhadap *Financial Distress* dengan model bankometer baik secara parsial maupun simultan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penilaian GCG dan jumlah DPS terhadap *Financial Distress* dengan model bankometer baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data panel dan metode analisis *Fixed Effect Model*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi data panel yang di olah menggunakan aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penilaian GCG tidak berpengaruh terhadap *financial distress* dengan model bankometer. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar (-1.032509) dan nilai probabilitas sebesar 0.3602 artinya nilai signifikansi > 0.05 . Variabel jumlah DPS berpengaruh negatif terhadap *financial distress* dengan model bankometer. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar (-0.411292) dan nilai probabilitas sebesar 0.7019 artinya nilai signifikansi > 0.05 . Secara bersama-sama, kedua variabel yaitu penilaian GCG dan Jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap *financial distress* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan model bankometer. Hal ini dibuktikan dengan nilai F-statistik sebesar 2.149788 dan nilai probabilitas F penilaian GCG dan jumlah DPS sebesar 0.238383 artinya nilai signifikansi > 0.05 .

Kata Kunci : GCG, DPS, *Financial Distress*, Bank Umum Syariah, dan Bankometer.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ely Kusmiyati
NPM : 1651020566
Prodi : Perbankan Syaria'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh Penilaian GCG dan Jumlah DPS Terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan Model Bankometer" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Agustus 2020
Penyusun



Ely Kusmiyati
1651020666



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1, Bandar Lampung, 35131 Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberi masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Ely Kusmiyati
NPM : 1651020566
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Penilaian GCG dan Jumlah DPS Terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 dengan Model Bankometer

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Tulus Suryanto, M.M., Akt., CA.
NIP. 197009262008011008


M. Yusuf Bahtiar, M.E.
NIP. 1987912082011001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Erike Anggraeni, M.E., Sv.
NIP. 1982080082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PENGARUH PENILAIAN GCG DAN JUMLAH DPS TERHADAP FINANCIAL DISTRESS BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018 DENGAN MODEL BANKOMETER"** disusun oleh, **ELY KUSMIYATI** NPM : 1651020566 program studi **PERBANKAN SYARIAH**. Telah di Ujikan dalam sidang Munasosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 31 Agustus 2020**

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.**

Sekretaris : **Gustika Nurmalia, M.Ek**

Penguji I : **Nurlaili, M.A**

Penguji II : **Prof. Tulus Suryanto, M.M., Akt. CA**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



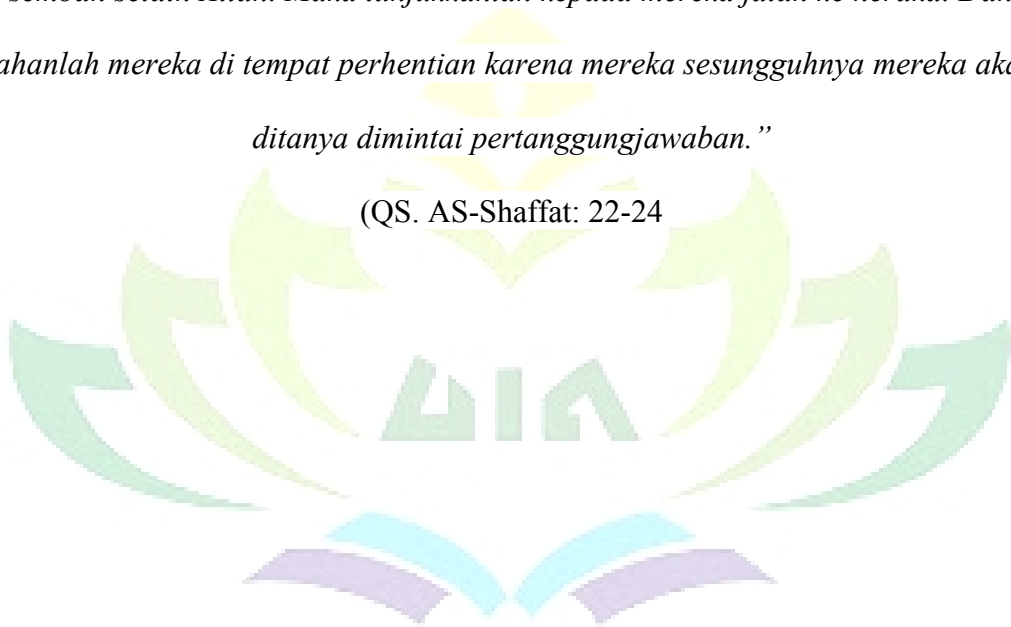
Dr. Kholid Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 198008012003121001

MOTTO

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾

“Kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang dzalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena mereka sesungguhnya mereka akan ditanya dimintai pertanggungjawaban.”

(QS. AS-Shaffat: 22-24)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah- Nya yang telah memberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan dan keikhlasan kepada penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang yang selalu menyemangati saya :

1. Kedua Orang tua dan adik-adik saya tercinta dan terkasih. Ibunda saya Eni Kusriani, Ayah saya Tugiman dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, yang selalu memberikan dukungan moril hingga materil sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan saya di kampus UIN Raden Intan Lampung.
2. Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada kedua pembimbing skripsi saya Bapak Prof. Tulus Suryanto, M.M, Akt. CA. dan Bapak M. Yusuf Bahtiar, M.E. yang telah dengan sabar dan banyak memberikan masukan dari awal pengajuan judul, seminar proposal hingga sidang munaqasah.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sangat saya hormati dan banggakan. Khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah akan selalu saya jaga namabaihnya.
4. Terimakasih saya ucapkan juga kepada Bank Indonesia KPW Lampung yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi penerima beasiswa untuk pembiayaan kuliah saya selama setahun terakhir dan memberikan kesempatan untuk bergabung dalam Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) sehingga saya mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan.
5. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2016, khususnya perbankan syariah kelas H yang telah berjuang bersama-sama, memberikan semangat, cerita senang maupun duka selama dalam proses perkuliahan dan di luar perkuliahan.
6. Teman – teman terdekat Rohayati, Iin, Adika, David, dan Rahmat yang telah dengan sabar mendengarkan cerita serta keluh kesah saya dalam proses mengerjakan skripsi ini.

7. Teman – teman seperbimbingan yang telah bersama-sama berjuang untuk saling memberikan semangat dan motivasi.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ely Kusmiyati, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Januari 1999 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Tugiman dan Ibu Eni Kusrini. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah:

1. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 03 Sawah Brebes pada tahun 2004, tamat dan mendapat ijazah pada tahun 2010.
2. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 24 Bandar Lampung pada tahun 2010, tamat dan mendapat ijazah pada tahun 2013.
3. Selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK-SMTI Bandar Lampung pada tahun 2013, tamat dan mendapat ijazah pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENGARUH PENILAIAN GCG DAN JUMLAH DPS TERHADAP FINANCIAL DISTRESS BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018 DENGAN MODEL BANKOMETER”. Adapun skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih Kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi
3. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah member arahan dan menyetujui judul skripsi, sehingga terpilihlah judul skripsi ini. Prof.Dr. Tulus Suryanto, M.M.,Akt.CA. selaku pembimbing utama dalam

4. penulisan skripsi ini dan Bapak Yusuf Bachtiar, S.Pd.I., M.E. selaku pembimbing dua yang telah mencurahkan pemikiran serta waktunya dalam membimbing penulis selama penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberikan bimbingan selama penulis menimba ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan referensi berupa buku-buku kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Almamater tercinta yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Penulis

Ely Kusmiyati
NPM. 1651020566

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Identifikasi Masalah	19
E. Batasan Masalah.....	20
F. Rumusan Masalah	20
G. Tujuan Penelitian	21

BAB II Landasan Teori

A. Kajian Teori	23
1. <i>Grand Theory</i>	23

a. Teori Perusahaan	23
b. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	25
c. Teori Pengawasan	26
2. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	29
3. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam Perspektif Islam.....	35
4. Implementasi GCG pada Perbankan Syariah.....	39
5. Dewan Pengawas Syariah	41
6. <i>Financial Distress</i>	47
7. Bank Syariah	50
8. Model Bankometer.....	55
B. Tinjauan Pustaka	57
C. Kerangka Berfikir.....	63
D. Hipotesis.....	64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	68
B. Populasi , Teknik Pengambilan Sampel dan Sampel Penelitian	69
1. Populasi dan Sampel	69
2. Teknik Pengambilan Sampel.....	70
C. Defenisi Operasional Variabel	70
1. Variabel Dependen	70
2. Variabel Independen	71
D. Metode Pengumpulan Data	71
1. Jenis Data	71
2. Sumber Data	72
3. Teknik Pengumpulan Data	72
E. Metode Analisis Data	73
1. Analisis Data Panel	74
2. Uji Asumsi Klasik	79
3. Analisis Uji Data Hipotesa	82

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	85
1. Profil PT. Bank BRI Syariah, Tbk	85
2. Profil PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	86
3. Profil PT. BTPN Syariah, Tbk	88
B. Hasil Analisis Data.....	89
1. Analisis Estimasi Model Regresi Data Panel	89
2. Hasil Uji Pemilihan Estimasi Model Regresi Data Panel ..	92
3. Analisis Regresi Data Panel	94
4. Uji Asumsi Klasik	97
5. Analisis Uji Data Hipotesa	99

C. Pembahasan	101
1. Pengaruh Penilaian GCG terhadap <i>Financial Distress</i> menggunakan Model Bankometer	101
2. Pengaruh Jumlah DPS terhadap <i>Financial Distress</i> menggunakan Model Bankometer	104
3. Pengaruh Penilaian GCG dan Jumlah DPS terhadap <i>Financial Distress</i> menggunakan Model Bankometer.....	106

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Bank Umum Syariah Tahun 2009-2018	6
Tabel 1.2 Daftar Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.....	15
Tabel 1.3 Financial Distress Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 (Model Bankometer)	16
Tabel 1.4 Penilaian Self Assessment Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa EfeK Indonesia Tahun 2016-2018 (Dalam Nillai Komposit)	17
Tabel 1.5 Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018	18
Tabel 4.1 Estimasi <i>Common Effect Model</i>	90
Tabel 4.2 Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	91
Tabel 4.3 Estimasi Random Effect Model	92
Tabel 4.4 Uji Chow	93
Tabel 4.5 Uji Hausman.....	94
Tabel 4.6 Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	95
Tabel 4.7 Uji Multikolinieritas	98
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas	98
Tabel 4.9 Penilaian GCG Terhadap <i>Financial distress</i>	102
Tabel 4.10 Jumlah DPS Terhadap <i>Financial Distress</i>	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	63
Gambar 3.1 Hasil Uji <i>Jarque Bera</i>	97



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pertumbuhan Jumlah Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018
- Lampiran 2 : Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di BEI.
- Lampiran 3 : Laporan Penilaian Self Assesment Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.
- Lampiran 4 : Laporan Jumlah DPS Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.
- Lampiran 5 : Rasio – Rasio yang digunakan untuk menghitung *Financial Distress* dengan Model Bankometer.
- Lampiran 6 : Perhitungan *Financial Distress* dengan Model Bankometer.
- Lampiran 7 : Kategori Nilai *Financial Distress* dengan Model Bankometer.
- Lampiran 8 : Tabulasi Gabung Penilaian GCG dan Jumlah DPS terhadap *Financial Distress* dengan Model Bankometer.
- Lampiran 9 : Hasil Regresi Data Panel Dengan Tiga Estimasi Model.



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk memudahkan serta memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Berdasarkan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul **“Pengaruh Penilaian GCG dan Jumlah DPS terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 dengan Model Bankometer”**.

Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹ Istilah pengaruh disebut juga dengan akibat asosiatif yaitu dimana suatu penelitian yang mencari pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel lainnya.

2. Penilaian

Penilaian adalah proses, cara, perbuatan menilai, pemberian nilai, penelaahan dan yang lengkap, formal seseorang atau komite yang

¹Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011), h. 1045.

mempunyai wewenang secara formal untuk menilai bawahannya di dalam ataupun di luar pekerjaan dan berhak menetapkan kebijakan selanjutnya terhadap karyawan itu.²

3. *Good Corporate Governance (GCG)*

Forum for corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat pengaturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurusan (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain adalah suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.³

4. Jumlah

Jumlah adalah banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu).⁴ Maksud Jumlah disini ialah berapa banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di Bank Umum Syariah.

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu lembaga yang dibentuk dan merupakan salah satu perangkat kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵

²“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (On-line) tersedia di: <https://kbbi.web.id/nilai> (12 November 2019).

³Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) Jilid II Edisi 2 (Jakarta : Forum for corporate Governance in Indonesia (FCGI), 2001), h. 5.

⁴“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (On-line) tersedia di : <https://jagokata.com/arti-kata/jumlah.html> (3Maret 2020).

⁵Darsono, Ali Sakti, dkk, *DinamikaProduk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 69.

6. *Financial Distress*

Financial Distress adalah kesulitan keuangan merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan berada dalam keadaan tidak sehat atau krisis sehingga arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan.⁶

7. Model Bankometer

Model bankometer merupakan model baru untuk memprediksi *financial distress* yang dikembangkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) di tahun 2000. Bankometer digunakan sebagai perhitungan dalam menggambarkan kondisi *financial distress* suatu bank pada periode tertentu.⁷

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan penulis mengenai pemilihan judul yang akan diangkat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Alasan memilih judul ini adalah ingin mengungkapkan secara nyata apakah ada pengaruh dari penilaian *Good Corporate Governance* dan Jumlah DPS terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

⁶ Hapsari, "Kekuatan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Kondisi *Financial Distress* Perusahaan Manufaktur Di BEI", *Jurnal Dinamika Manajemen*, (2012), h. 138.

⁷ Teguh Budiman, Aldrin Herwany, dan Farida Titik Kristanti, "Evaluasi Stres Keuangan Bank Islam di Indonesia menggunakan Model Bankometer", *Jurnal Keuangan dan Perbankan Ulasan*, Vol.2 No.3, (2017), h. 16.

- b. Judul ini dipilih karena keingintahuan penulis untuk mengetahui dan menganalisa *Financial Distress* dapat diprediksi atau tidak.

2. Alasan Subjektif

Alasan subjektif karena judul ini bagi penulis cukup menarik untuk diteliti, dan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini merupakan termasuk ke dalam salah satu bidang studi keilmuan yang penulis pelajari yaitu jurusan Perbankan Syariah, serta tersedianya literatur yang cukup dan mendukung sehingga memungkinkan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana tersebut disebut dengan kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan *financing* atau *lending*. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku. Utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam, juga mengikuti kaidah hukum perbankan yang berlaku dan telah diatur oleh bank sentral.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 108.

10 tahun 1998, bank terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁹ Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁰

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹¹ Prinsip ini yang menggantikan prinsip bunga pada sistem bank perbankan konvensional.

Perkembangan industri perbankan syariah yang salah satunya ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (3 dan 4).

¹⁰Ari Kristin Presetyoningrum, "Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah". *Jurnal Aset* Vol. 12 No. 1 (2010), h. 27.

¹¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat (12).

tangguh, tentu saja diperlukan pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang efektif.¹²

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Indonesia per Oktober 2017, jumlah aset bank umum syariah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga Oktober 2017, selanjutnya saat ini jumlah bank umum syariah bertambah lagi menjadi 13 bank. Bank yang baru tercatat sebagai bank umum syariah yaitu Bank Aceh Syariah per Mei 2015 dan Bank Tabungan Pensiunan Syariah per Juli 2014. Melihat fakta ini, bank umum syariah terus tumbuh dan melakukan perbaikan dari berbagai aspek salah satunya adalah aspek layanan.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Jumlah Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018

	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Umum Syariah	12	13	13	14	14

Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2018.aspx>.¹³

Eksistensi bank syariah juga saat ini kian populer. Antusiasme masyarakat terhadap lembaga keuangan yang terbilang baru dalam kancah perekonomian Indonesia ini semakin meningkat termasuk juga kalangan pebisnis. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki wewenang melakukan banyak aktivitas,

¹²Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta:Salemba Empat, 2013), h.397.

¹³“Statistik Perbankan Syariah per Desember 2018” (Online), tersedia di: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2018.aspx> (diakses pada 20 November 2019).

bank syariah dihadapkan pada berbagai macam risiko *inherent* (melekat). Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi dan dikelola sedini mungkin. Berbagai eksposur risiko tersebut bisa berupa penurunan tingkat kesehatan bank hingga risiko kebangkrutan.¹⁴

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka dapat mudah terpengaruh jika terjadi fluktuasi pada perekonomian dunia, seperti pada pertengahan tahun 1997. Indonesia mengalami ketidakstabilan sistem perbankan saat dunia mengalami fluktuasi ekonomi. Krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia dimulai dengan menurunnya nilai rupiah akibat meningkatnya permintaan Dollar AS. Melemahnya perekonomian Indonesia kembali terjadi tahun 2002-2005 dimana struktur perbankan Indonesia belum berubah akibat dampak krisis yang terjadi tahun 1997. Krisis finansial global kembali terjadi pada tahun 2007-2010, krisis ini dikenal dengan sebutan *Subprime Mortgage Crisis* atau krisis kredit macet. Krisis tersebut dimulai ketika *mortgage* (kredit perumahan) yang diberikan kepada debitur yang tidak layak memperoleh kredit, atau memiliki latar belakang kredit yang buruk. *Subprime Mortgage Crisis* ini yang menjadi awal dari krisis yang kemudian meluas pada sektor keuangan dan sektor riil di berbagai Negara kawasan Eropa dan Amerika. Krisis finansial global ini berakibat pada perlambatan ekonomi dunia pada akhir 2008.¹⁵

¹⁴Muhammad Nadrattuzaman Hosen dan Shofaun Nada, "Pengukuran Tingkat Kesehatan dan Gejala *Financial Distress* Bank Umum Syariah". *Jurnal Economia*, Volume 9, Nomor 2 (2013), h. 215.

¹⁵Febby Prianti, "Pengaruh RBEC Dan Variabel Makroekonom Terhadap *Banking Distress* dengan menggunakan CD Indeks di Indonesia". *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 6 Nomor 3 (2018), h.342.

Badai krisis yang menghantam Indonesia tahun 1998, telah menghancurkan kehidupan perekonomian Indonesia, tidak terkecuali negara-negara Asia Tenggara juga tidak luput dari krisis ekonomi dan moneter. Namun secara faktual Indonesia yang paling lama melaksanakan proses pemulihan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan oleh parahnya tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga perbaikan ekonomi memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Perbankan juga tidak luput dari krisis, yakni ditandai dengan banyaknya bank-bank yang dilikuidasi, dibekukan dan digabung dengan bank-bank lain (*merger*), hal ini lebih disebabkan oleh adanya praktik perbankan yang sangat kurang menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam mengelola kegiatan usaha, khususnya dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lemahnya analisis kredit pada perbankan ikut andil dalam menyebabkan terjadinya krisis. Memburuknya situasi perekonomian Indonesia akibat suku bunga tinggi dan depresiasi nilai tukar mata uang rupiah ternyata justru membawa akibat yang sangat buruk pada dunia perbankan.¹⁶

Krisis ekonomi di penghujung dekade 1990-an menjadikan perekonomian bangsa nyaris hancur. Hal ini diperparah oleh terjadinya lonjakan tingkatan suku bunga bank yang bukan saja mencekik para peminjam, tetapi juga bank itu sendiri. Usaha-usaha dalam berbagai skala praktis lumpuh karena usaha tanpa kucuran modal kerja ibarat tubuh tanpa suplai darah. Bank-bank mengalami *negative spread* atau keuntungan minus akibat bunga yang dibayar

¹⁶Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 5.

lebih tinggi dari daripada bunga yang didapat. Akibatnya, keuntungan bank menjadi terkikis. Setelah keuntungan itu habis, giliran modal yang dipergunakan untuk menutupinya. Ketika modal juga habis, bank-bank meminta Bank Sentral untuk menutupi kebutuhan likuiditasnya dengan apa yang disebut BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak mengenal *negative spread*. Keuntungan yang dibagikan kepada penyimpan bergantung pada keuntungan usaha nasabah yang menggunakan dana tersebut. Jika usaha yang dikelola para mitra mendapatkan keuntungan, para penyimpan mendapat keuntungan pula. Jika para mitra mengalami kegagalan usaha, para penyimpan tidak bisa menuntut untuk dibagikan keuntungan.¹⁷

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank yang saat itu secara murni menerapkan prinsip syariah bagi hasil dalam operasional kegiatan usahanya. Pada saat krisis berlangsung secara faktual BMI merupakan salah satu bank yang sehat, karena mempunyai CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dengan kategori A (4% keatas), dengan demikian selama krisis ekonomi terjadi, bank syariah ternyata masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah NPF pada bank syariah dan tidak terjadi *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Kondisi ini tentu saja dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teor ke Praktik* (Jakarta: Gema Isnani, 2007), h. 238.

sehingga pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat.¹⁸

Pada tahun 2015 muncul isu mengenai kenaikan tingkat suku bung acuan oleh *Federal Reserve* yang merupakan Bank Sentral USA (*The Fed*). Meskipun hanya isu, namun hal tersebut mampu membuat ekonomi, terutama pada negara berkembang terombang-ambing akibat ketidakjelasan rencana tersebut. Kondisi tersebut juga mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Salah satu dampaknya terjadi pada kondisi industri perbankan yang menyebabkan kekhawatiran akan terulangnya masa krisis tahun 1997 dan 2008. Krisis keuangan ini mempengaruhi tingkat kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban (*Credit Risk*) yang ditunjukkan dengan rasio NPF. Meningkatnya rasio NPF berarti tingkat risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah meningkat di saat terjadi krisis keuangan. Akibat krisis tersebut, salah satu bank syariah di Indonesia yaitu bank Muamalat yang merupakan bank umum syariah pertama di Indonesia hampir mengalami kebangkrutan jika tidak di bailout (mendapat suntikan dana) oleh *Islamic Development Bank*. Bank Muamalat mengalami peningkatan NPF mencapai lebih dari 60% yang menyebabkan terjadinya kerugian mencapai Rp 105 miliar dan ekuitas terendah hingga Rp 39,3 miliar atau kurang dari sepertiga modal awal dengan nilai *Gross NPF* mencapai 7,11% di tahun 2015.¹⁹ Pada saat krisis ekonomi tersebut, Bank Muamalat yang merupakan bank umum pertama di Indonesia

¹⁸Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.9.

¹⁹Ayu Alvidianita dan Lucky Rachmawati, "Pengaruh RGEC Terhadap *Financial Distress* Pada Bank Muamalat Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2 Nomor 2 (2019), h. 98.

yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya juga hampir tutup. Kesulitan keuangan yang dialami Bank Muamalat tersebut membantah anggapan sebagian besar praktisi keuangan syariah yang mengatakan bahwa bank syariah kebal terhadap krisis. Hal itu membuktikan bahwa bank syariah tetaplah sebuah business agreement yang tetaplah rentan jika dihadapkan pada situasi krisis.

Pada tahun 2017 terdapat beberapa kasus (*fraud*) yang terjadi pada bank syariah di Indonesia diantaranya adalah mantan pimpinan Bank Syariah Mandiri cabang Jayapura terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal ini sesuai dengan hasil audit khusus yang dilakukan oleh tim auditor PT. Bank Mandiri Syariah Pusat²⁰. Selanjutnya di tahun 2018 adanya pemberian pembiayaan fiktif oleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) kepada PT Hastuka Sarana Karya dan CV Dwi Manunggal Abadi yang diduga BJBS tidak melakukan proses pencairan pembiayaan sesuai prosedur²¹. Pembiayaan bermasalah pun terjadi kepada sejumlah bank syariah di Indonesia pada tahun 2018 yaitu diantaranya PT Bank BNI Syariah yang membukukan NPF gross naik dari 2,89% menjadi 2,93%. Hal ini diiringi dengan pertumbuhan pembiayaan yang naik signifikan sebesar 19,93% yoy menjadi Rp 28,3 triliun di tahun 2018 dan PT Bank BCA Syariah juga mencatatkan peningkatan NPF

²⁰ Zulkarnain Harahap., *Mantan Orang Berpengaruh di Bank Syariah Mandiri, Tersandung Kasus Pencucian Uang!* Retrieved Maret 11, 2018, Tersedia : <https://www.winnetnews.com/post/mantan-orang-berpengaruh-di-bank-syariah-mandiri-tersandung-kasus-pencucian-uang-> (diakses pada 20 November 2019).

²¹ Denita Matondang, *Kasus Korupsi BJB Syariah, Polri Sita Aset 2 Perusahaan Kontraktor*. Retrieved Maret 11, 2018, Tersedia DetikNews : <https://news.detik.com/berita/d-3823935/kasus-korupsi-bjb-syariah-polri-sita-aset-2-perusahaan-kontraktor> (diakses pada 20 November 2019).

di tahun lalu. Kendati jauh lebih rendah dari rata-rata industri, NPF BCA Syariah naik dari 0,32% menjadi 0,35%.²²

Di Indonesia, pembahasan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi sangat penting karena momentum krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi pada 1997 yang selanjutnya diikuti dengan gerakan reformasi yang menghasilkan kesadaran akan pemberantasan korupsi. Bahkan, salah satu biangkrisis ekonomi dan keuangan itu adalah terlalu buruknya *corporate governance* yang terdapat pada perbankan Indonesia. Lemahnya implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), disebabkan karena pelaku bisnis seringkali menjadikan keuntungan materi yang sebesar-besarnya sebagai suatu tujuan utama dalam melakukan aktivitas bisnis. Demi tercapainya tujuan tersebut, segala cara mulai dari yang baik bahkan cara yang kotor akhirnya digunakan oleh pebisnis. Hal semacam itu lebih dikenal dengan istilah bisnis amoral artinya, tidak ada lagi aturan, norma maupun etika karena yang ada hanyalah menjadikan bisnis sebagai arena pertempuran untuk saling menjatuhkan, mengalahkan, dan membunuh pesaing bisnis yang lain. Dari krisis itu pulalah, isu *corporate governance* menjadi kuat dan menyebar ke semua lapisan masyarakat. Selain aset yang meningkat dan permodalan yang kuat, bank perlu didukung pula oleh pengurus, Dewan Pengawas Syariah, dan pejabat bank yang mampu dan kompeten untuk mengelola bank secara sehat. Oleh sebab itu, persyaratan kepengurusan dan Dewan Pengawas Syariah bank perlu

²² Tendi, Pembiayaan bermasalah di sejumlah bank syariah menggempuk di 2018 (Online), tersedia di : <https://keuangan.kontan.co.id/news/pembiayaan-bermasalah-di-sejumlah-bank-syariah-menggempuk-di-2018> (diakses pada 06 September 2020).

perlu disempurnakan antara lain yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, perangkapan jabatan, dan independensi dari pengurus dan Dewan Pengawas Syariah dengan cara seleksi administratif dan wawancara sebagai salah satu pilar dalam menciptakan *good corporate governance* di dunia perbankan.²³

Bank syariah saat ini menghadapi tantangan dalam hal tata kelola yang baik bagi perusahaan atau *good corporate governance* (GCG), tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. GCG diperlukan bagi bank syariah, karena pentingnya kepercayaan para stakeholder terhadap bank syariah itu sendiri. Bahkan dalam prakteknya, GCG bisa berfungsi sebagai instrumen wajib dan formal untuk memberikan laporan keuangan publik secara transparan dari bank syariah. Dalam rangka menghindari kekurangan bank syariah dalam penerapan GCG, manajemen keuangan Islam memberikan panduan untuk menghadapi kondisi formalitas dari GCG bank-bank syariah. Jadi GCG dan manajemen keuangan syariah keduanya sangat penting. Akhirnya, GCG harus diterapkan dengan cara membimbing manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan disertai iklim asumsi normatif religius dan juga ekonomi sosial.²⁴

Dalam kajian *good corporate governance* perbankan syariah, bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, perbedaannya adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi

²³Widyaningsih, et. al. *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), h. 62.

²⁴Syafrudin Arif Marah Manunggal, “*Good Corporate Governance* dan Manajemen Keuangan dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal Muqtasid*, Volume 10, Nomor 2 (2011), h.1.

operasional bank dan produk agar sesuai dengan garis-garis syariah. Perbankan syariah dikenal dengan adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathonah*)²⁵. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur'an surat Asy-syu'araa' ayat 183 :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak – haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.²⁶

Salah satu cara bagi perusahaan untuk bangkit dari buruknya kinerja perusahaan setelah kena imbas krisis moneter ialah dengan penerapan *good corporate governance* yang baik.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari penilaian GCG dan Jumlah DPS terhadap *financial distress* dalam Bank Umum Syariah di Indonesia, penulis menggunakan objek Bank Umum Syariah yang terdaftar Bursa Efek Indonesia. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hanya terdapat 3 diantaranya :

²⁵Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Depok : Gema Insani, 2007), h. 30.

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (CV. Penerbit J-ART : Bandung, 2005), h. 369.

Tabel 1.2
Daftar Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

No	Nama Bank Umum Syariah	Tanggal Pencatatan
1	Bank BRI Syariah	1 Januari 1911
2	Bank Panin Dubai Syariah	15 Januari 2014
3	BTPN Syariah	8 Mei 2018

Sumber : <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/>²⁷

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Financial Distress*. *Financial distress* atau kesulitan keuangan merupakan kondisi di mana keuangan perusahaan berada dalam keadaan tidak sehat atau krisis sehingga arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan²⁸, untuk mengukur *financial distress* dalam penelitian ini digunakan menggunakan model Bankometer. Berikut adalah data *financial distress* yang menggunakan model Bankometer pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

²⁷”Perusahaan Tercatat Di Bursa Efek Indonesia “, PT. Bursa Efek Indonesia (On-line) Tersedia di : <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/>(diakses pada 09 Maret 2020).

²⁸Hapsari, E. I., “Kekuatan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Kondisi *Financial Distress* Perusahaan Manufaktur Di BEI”, *Jurnal Dinamika Manajemen*, (2012),h. 138.

Tabel 1.3
Financial Distress Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018 (Model Bankometer)

Bank Umum Syariah	2016	2017	2018
Bank BRI Syariah	143,82	138,63	189,72
Bank Panin Dubai Syariah	129,66	107,42	179,64
BTPN Syariah	186,66	208,04	268,65

Sumber : https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.php?f=annual,
<https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami/laporantahunan>,
<https://www.btpnsyariah.com/laporan-tahunan>.²⁹

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa nilai *financial distress* yang diukur menggunakan model bankometer mengalami fluktuasi antara ketiga bank tersebut dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Nilai *financial distress* yang diperoleh diatas 70 ini menandakan bahwa bank dalam keadaan yang sehat, namun terjadi penurunan di tahun 2007 pada Bank BRI Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah.³⁰

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian *Good Corporate Governance* dan jumlah DPS. Penilaian GCG dilihat dari indeks komposit GGC dimana semakin baik penilaiannya maka sumber daya yang ada dalam bank tersebut baik. Berikut ini disajikan tabel

²⁹“Data Diolah dari Laporan Keuangan Tahunan” (Online) Tersedia di : https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.php?f=annual, <https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami/laporantahunan>, <https://www.btpnsyariah.com/laporan-tahunan>(Diakses pada 20 November 2019).

³⁰Nova novita, Andi Salahudin Akbar, dan Putri Dwi Handayani, “Analisis Kebangkrutan Bank Melalui *Rentabilitas*, *Capital* dan Bankometer : Studi Pada Bank Umum Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, Vol 2 No. 1 (2016), h. 13.

data hasil *self assessment* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Penilaian *Self Assessment* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018 (Dalam Nilai Komposit)

Bank Umum Syariah	2016	2017	2018
Bank BRI Syariah	1,60	1,57	1,54
Bank Panin Dubai Syariah	2,00	3,00	2,00
BTPN Syariah	2,00	2,00	2,00

Sumber : https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.php?f=gcg,
<https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami/mlaporanpelaksanaan>
[ksanaangcg, https://www.btpnsyariah.com/laporan-tahunan](https://www.btpnsyariah.com/laporan-tahunan).³¹

Penilaian GCG yang diukur dengan menggunakan nilai komposit rata-rata bank umum syariah di Indonesia mulai dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan, namun tahun 2017 pada Bank Panin Dubai Syariah sempat mengalami penurunan. Sedangkan untuk Bank BRI Syariah dari tahun 2016 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan hingga mencapai nilai 1,54 dan untuk BTPN Syariah stagnan berada pada nilai 2,00. Secara umum dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan *good corporate governance* Manajemen Bank telah melakukan yang secara umum baik. Keberhasilan penerapan GCG, ketika perusahaan mampu menjalankan fungsi akuntabilitas, *fairness*, *transparency*,

³¹“Data dari Laporan GCG Tahunan” (Online) Tersedia di
: https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.php?f=annual,
<https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami/laporantahunan>,
<https://www.btpnsyariah.com/laporantahunan>
hunan (Diakses pada 20 November 2019).

tanggungjawab, dan independensi secara menyeluruh di setiap bagian dalam perusahaan.³²

Variabel independen yang kedua dalam penelitian ini adalah jumlah DPS. Jumlah DPS yang dimaksud disini merupakan banyaknya dewan pengawas syariah yang terdapat di dalam suatu bank syariah. Berikut disajikan tabel mengenai Jumlah DPS bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018

Bank Umum Syariah	Jumlah DPS		
	2016	2017	2018
Bank Panin Dubai Syariah	2	2	2
Bank BRI Syariah	2	2	2
BTPN Syariah	2	2	2

Sumber: https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.php?f=gcg,
<https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami/mlaporanpelaksanaangcg>, <https://www.btpnsyariah.com/laporan-tahunan>.³³

Berdasarkan tabel diatas dari ketiga Bank Umum Syariah terdapat jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah dapat meningkatkan level pengungkapan. Semakin besar jumlah anggota

³²Angrum Pratiwi, “Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2015)”, *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, (2016), h. 56, Mengutip Tangkilisan, Hessel Nogi S, Mengelola Kredit Berbasis *Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Balaiurang, 2003), h. 10.

³³“Data dari Laporan GCG Tahunan” (Online) Tersedia di https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.php?f=annual, <https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami/laporantahunan>, <https://www.btpnsyariah.com/laporan-tahunan> (Diakses pada 20 November 2019).

dewan pengawas syariah, maka kinerja bank semakin efektif sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial secara islami juga meningkat.³⁴

Secara umum bank syariah sudah melakukan *self assessment* atas praktik *good corporate governance* yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku, dan hasilnya baik serta dilaporkan setiap tahunnya. Namun walaupun *self assessment* telah rutin dilakukan akan tetapi masih saja terjadi fraud yang tidak lain pelakunya adalah oknum dari internal bank syariah sendiri. Fraud yang terjadi dalam jangka panjang dapat menyebabkan bank syariah mengalami kebangkrutan. Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Penilaian GCG dan Jumlah DPS terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 dengan Model Bankometer”**.

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Terjadi Krisis financial global karena kredit macet.
2. Meningkatnya rasio NPF pada Bank Syariah
3. Penurunan tingkat kesehatan bank hingga risiko kebangkrutan.
4. Struktur keuangan yang salah.

³⁴Febry Ramadhani, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014)”, *Jom Fekon*, Vol.3 No.1, (2016), h. 249
Mengutip Amirul Khoiruddin, “*Corporate Governance* Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*(2013), h. 7.

5. Kondisi makro ekonomi yang buruk.
6. Kesalahan dalam alokasi sumber daya.
7. Terjadi risiko gagal bayar.
8. Pelaksanaan GCG yang tidak sesuai.
9. Terjadi *fraud* pada *stakeholder*.
10. Pengawasan DPS yang kurang efektif.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi penelitian hanya berfokus pada pengaruh GCG dan jumlah DPSterdap *Financial Distress* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah DPS terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Jumlah DPS terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah?

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah DPS terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Jumlah DPS terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah.

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan bagi akademik, dan memberikan sumbangsih pengetahuan dan penilaian terhadap pengaruh penilaian GCG dan jumlah DPS terhadap *Financial Distress*, serta menambah literatur di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya pada Jurusan Perbankan Syaria'ah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Umum Syariah

Untuk dapat memberikan informasi tentang pentingnya upaya memprediksi terjadinya *Financial Distress* yang apabila terjadi sewaktu-waktu.

b. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan kemampuan kreativitas dalam memecahkan masalah ilmiah, serta dapat membandingkan teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan dengan penelitian langsung dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Intan Negeri Raden Intan Lampung.

c. Bagi Peneliti Lain

Dapat menjadikan bahan sebagai referensi untuk melanjutkan atau mengembangkan penelitian mengenai pengaruh GCG dan jumlah DPS terhadap *financial distress* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa EfekIndonesia

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. *Grand Theory*

a. Teori Perusahaan

Teori Perusahaan (*Theory of the firm*) adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang / jasa untuk dijual. Dalam jangka panjang keberadaan mereka tidak saja menguntungkan bagi pemilik / pemegang saham, namun juga akan membawa manfaat bagi masyarakat luas dan pemerintah melalui suatu proses yang disebut arus kegiatan ekonomi (*The Circular Flow of Economic Activity*). Teori perusahaan adalah konsep dasar yang digunakan dalam kebanyakan studi ekonomi manajerial. Perusahaan bisnis adalah kombinasi antara orang, asset fisik dan keuangan, serta sistem dan informasi-informasi. Orang yang terlibat langsung langsung: *shareholders, management, employee, supplier, customers* mereka dipengaruhi secara langsung oleh operasional perusahaan.³⁵

Corporate governance pada dasarnya merupakan mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut suatu aturan ‘hak’ dan ‘kuasa’ tertentu. Ia mengarahkan aksi individu

³⁵ Benny Agus Setionoteori, “Perusahaan / Theory Of The Firm : Kajian Tentang Teori Bagi Hasil Perusahaan (Profit And Loss Sharing) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, Volume 5, Nomor 2, Maret 2015, h. 155-156.

dalam organisasi dan kegiatan rutin tertentu pada suatu muara. Muara itu bisa berupa menghasilkan laba sebesar-besarnya dan juga etika sosial. Dalam pengelolaan bisnis, hal yang tidak kalah penting adalah pengelolaan bisnis yang senantiasa berlandaskan pada etika, sehingga ada jaminan bahwa roda bisnis akan berjalan dengan baik, aman, nyaman, serta sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, keuntungan yang menjadi tujuan bisnis juga akan mudah dicapai, baik keuntungan finansial maupun keuntungan yang sifatnya immateri, yaitu nilai-nilai yang lahir akibat adanya bisnis yang beretika. Adapun Islam, menempatkan aktivitas perdagangan (bisnis) dalam posisi yang strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Islam memberikan tuntunan untuk senantiasa menjalankan bisnis dengan berdasarkan etika terkonsep dalam satu tatanan etika bisnis Islami. Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya (pebisnis). Oleh sebab itu, salah satu misi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi, setiap pebisnis, terutama pebisnis muslim harus meneladani bisnis Rasulullah yang senantiasa memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup *hunul khuluq*. Dalam Islam diajarkan adanya keseimbangan rujukan dalam menjalankan roda bisnis, yaitu tujuan untuk dunia (materi) dan tujuan untuk

akhirat (ibadah). Kedua tujuan inilah yang membedakan bisnis Islami dengan bisnis modern pada umumnya.³⁶

b. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan dasar untuk dapat memahami *corporate governance* secara keseluruhan. Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada Tahun 1976. Teori keagenan mengimplikasikan adanya kesenjangan informasi antara manajer sebagai agen dengan pemilik. Pengungkapan merupakan suatu cara untuk mengatasi masalah kesenjangan informasi tersebut. Teori Keagenan muncul setelah ada fenomena pemisahan tugas antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak pengelola perusahaan (*agent*). Pemilik perusahaan menginginkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh pihak manajemen. pemisahan ini memiliki segi negatif, karena pihak pengelola bisa sangat leluasa mengelola perusahaan untuk memaksimalkan laba bagi kepentingan sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan.³⁷

Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada

³⁶ Muhammad Yusuf dan Wiroso. *Bisnis Syari'ah*. Edisi I (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007),h. 4.

³⁷ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.17.

manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. *Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri, menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer.³⁸

c. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Secara fungsional terdapat banyak sebutan pengawasan (*controlling*), seperti *evaluating* dan *correcting*, hanya saja pengawasan lebih banyak digunakan karena lebih mengandung

³⁸ Maf'ul Taufiq, Ade Fatma Lubis, Dan Sri Mulyani, "Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)". *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 7 No. 1 (Januari 2014), H. 68-69.

konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif.³⁹

Definisi pengawasan syariah pada umumnya meninjau dari sisi kelembagaan dan tujuan organisasi yang mendapat pengawasan. Adapun definisi pengawasan yang focus pada lembaga keuangan syariah adalah proses pencegahan, perbaikan, kelengkapan terhadap pengawasan, peninjauan dan analisis terhadap semua aktivitas, produk, kontrak dari lembaga keuangan syariah. Dalam definisi yang lebih luas yang disampaikan oleh Makmur, pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁰

Istilah pengawasan sebenarnya sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Sebagai amirul mukminin Rasulullah SAW aktif mengawasi pegawai dan mendengarkan informasi tentang aspek kinerja dari pemerintahannya, terlebih tentang audit keuangan negara. beliau selalu mengaudit pengeluaran dan pendapatan negara dari para petugas yang mengumpulkan zakat. Pada masa Rasulullah SAW aktivitas hisbah atau pengawasan dari pemerintah terhadap pelanggaran yang terjadi pada masyarakat yang tidak sesuai dengan syariah Islam sudah mulai diterapkan. Ketika itu

³⁹ Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2003), 359.

⁴⁰ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: Rfika Aditama, 2011), 176.

kasus-kasus hisbah diselesaikan oleh Rasulullah SAW sendiri, dan adakalanya eksekusi hukumannya diserahkan kepada para sahabat. Adapun orientasi hisbah pada masa Rasulullah SAW umumnya pada pengawasan pasar dan penertiban harga. Para ahli sejarah pada umumnya menyatakan bahwa Rasulullah SAW mendirikan sebuah pemerintahan ditandai dengan lahirnya piagam madiah. Piagam yang menjadi konstitusi pertama yang mengatur sebuah Negara. Piagam yang berisi 47 pasal ini memuat peraturan-peraturan dan hubungan antara komunitas dalam masyarakat Madinah yang majemuk.⁴¹ Dari ulasan singkat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya tugas-tugas pengawasan sudah ada sejak Rasulullah SAW menjadi pemimpin kota Madinah.

Adapun evaluasi terhadap sebuah kesalahan atau pengawasan dalam bahasa perbankan, banyak sekali disinggung dalam Islam, baik dalam Alqur'an maupun dalam Hadits, Allah SWT menegaskan dalam Surat Qaf ayat 16-17:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ^ط وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ

الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 33.

Artinya “*Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,(yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.*” (Qs. Al – Qaf : 16-17).⁴² Ayat di atas tidak secara langsung dan spesifik menjelaskan pengawasan, namun jika dipahami lebih mendalam lagi ayat dan hadits tersebut memiliki makna yang berhubungan dengan pengawasan.

2. *Good Corporate Governance (GCG)*

a. Pengertian *Good Corporate Governance (GCG)*

Corporate governance merupakan proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.⁴³

Good Corporate Governance secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan akan menarik minat para investor, baik

⁴² Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: J-ART), 519.

⁴³ Suprayitno, G dkk, *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance* (Jakarta : The IICG,, 2004), h. 24.

domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru. *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.⁴⁴

b. Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Secara teoritis, pelaksanaan *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor.⁴⁵

c. Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Beberapa prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang tercantum dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan

⁴⁴ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana dan Jajajng Bazruzaman, *Good Corporate Governance* (Tasikmalaya : LPPM Siliwangi, 2015) , h. 11.

⁴⁵ Muhammad Nasrum Akal, *Corporate Governance, (Konsep, Teori dan Perbandingan Pelaksanaan Beberapa Negara Asia)*, (Maros, 2014), h. 10. Mengutip Tjager et.al, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia* (Jakarta: PT.Prenhallindo, 2003).

Governance (KNKG) pada tahun 2006 terdiri dari *Transparency* (Keterbukaan Informasi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Fairness* (Kejujuran), *Responsibility* (Pertanggungjawaban). Untuk terciptanya *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip tersebut harus dicapai oleh perusahaan dengan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak baik di dalam maupun diluar perusahaan.⁴⁶

1) Keterbukaan Informasi (*transparency*)

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

2) Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi serta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan

⁴⁶Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Substantly* (Jakarta : Salemba Empat, 2008), h. 28.

nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

3) Kewajaran (*fairness*)

Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

4) Kewajaran (*fairness*)

Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus

melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.⁴⁷

d. Sistem Penilaian *Good Corporate Governance*

Penilaian terhadap pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia dilakukan oleh lembaga independen yaitu: *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dijawab oleh pihak manajemen perusahaan. Aspek yang dinilai meliputi Hak-hak Pemegang Saham, Kebijakan *Corporate Governance*, Praktek-praktek *Corporate Governance*, Pengungkapan, dan Fungsi Audit. Penentuan skor pelaksanaan dilakukan melalui metode rata-rata tertimbang, dengan bobot masing-masing aspek sebagai berikut:

- 1) Hak-hak Pemegang Saham (20%).
- 2) Kebijakan *Corporate Governance* (15%).
- 3) Praktek-praktek *Corporate Governance* (30%).
- 4) Pengungkapan atau *Disclosure* (20%)
- 5) Fungsi Audit (15%).

Penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menurut Surat Edaran BI No. 12/13/DPbs, tanggal 3 April 2011 disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate*

⁴⁷ Muhammad Nasrum Akal, *Corporate Governance, (Konsep, Teori dan Perbandingan Pelaksanaan Beberapa Negara Asia)*, (Maros, 2014), h.28-29. Mengutip Tjager et.al, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta: PT.Prenhallindo,2003).

Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh sebuah bank dibagi dalam dua golongan, yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS, harus mencakup 11 faktor berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris,
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- 4) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah;
- 5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- 6) Penanganan benturan kepentingan;
- 7) Penerapan fungsi kepatuhan;
- 8) Penerapan fungsi audit intern;
- 9) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 10) Batas maksimum penyaluran dana, dan;
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.⁴⁸

⁴⁸ Any Eliza, *Analisa Peringkat Good Corporate Governance (GCG) Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya di Indonesia dan pengaruhnya terhadap Risiko Bank* (Lampung: Permatanet, 2015), h. 31-32.

3. *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Islam

Corporate governance dalam Islam adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah.⁴⁹ *Islamic Corporate Governance* mempertimbangkan efek hukum syariah dan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada praktek dan kebijakan, misalnya pada lembaga zakat, pelarangan spekulasi, dan pengembangan sistem ekonomi yang didasarkan pada bagi hasil.⁵⁰

Pengambilan keputusan yang dilakukan melebihi konteks *corporate governance* konvensional yang mencakup pemegang saham, supplier, kreditur, konsumen, pesaing, dan karyawan.⁵¹ Tujuan utama *Islamic Corporate Governance* adalah *Maqasid Shariah* yang merujuk pada kesejahteraan masyarakat.⁵² Terdapat empat prinsip *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah yang diambil dari sifat wajib para rasul diantaranya:

⁴⁹ Najmuddin. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern* (Yogyakarta: 2011), h. 28

⁵⁰ Maria Bhatti & Ishaq Bhatti, "Development in Legal Issue of Corporate Governance in Islamic Finance", *Journal of Economic & Administrative Sciences*, Volume 25 No. 1, (2009), h. 67-91.

⁵¹ Mervyn Lewis, "Accountability and Islam", *Conference Paper presented at Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition Adelaide*, Volume 1, (2006), h. 10-12.

⁵² Zulkifli Hasan, "Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives", *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5 No. 1, (2009), h. 277-293.

1) *Shiddiq*

Shiddiq berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta. Kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam *corporate governance* secara islam. Beberapa dasar hukum tentang sifat *shiddiq* ini adalah:

﴿ أَجْعَلْكُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”
(QS At-Taubah:[9]: 119).

2) *Amanah*

Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini memberikan *trustworthiness* (kepercayaan) dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan *image* atau reputasi.

Dasar hukum sifat amanah yang digunakan dalam *corporate governance* secara Islam adalah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji janjinya” (QS Al-Mu’minun [23]: 8).

3) *Tabligh*

Tabligh berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran. Kalau dahulu rasul menyampaikan wahyu Allah swt, maka sekarang umat muslim wajib pula menyampaikan kebenaran. Allah swt memerintahkan menegakkan yang makruf dan mencegah yang munkar serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Hal ini tercantum dalam QS Ali Imran (110).

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ

وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." (QS Ali Imran: [3] 110).

4) *Fathanah*

Fathanah berarti cerdas. Penelitian-penelitian tentang *corporate governance* yang dikaitkan dengan kecerdasan atau kompetensi dapat dilihat dari prestasi kerja, pengalaman, pendidikan, masa kerja, dan pelatihan yang diikuti. Perusahaan membutuhkan orang yang cerdas sebagai SDM-nya. Dengan kecerdasan yang dimiliki, maka permasalahan perusahaan akan teratasi, sehingga kinerja dan nilai perusahaan akan meningkat. Pada masa rasul, kecerdasan diperlukan untuk menyampaikan wahyu Allah swt kepada umatnya, tidak semua umat menerima apa yang diajarkan dan disampaikan rasul. Karena itulah, diperlukan kecerdasan untuk menghadapi kaum tersebut. Hal ini tercantum dalam QS. Al An'am (83)

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

Artinya: "Dan itulah hujah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya".

Kecerdasan yang diberikan Allah swt kepada umatnya harus di manfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Allah swt tidak menyukai kaum yang malas dan tidak mau berfikir dengan menggunakan akalanya.⁵³

4. Implementasi *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif. Di samping itu juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam al-Quran, Hadis, dan Ijma' para ulama. Penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif di lembaga keuangan syariah merupakan keharusan. *Good Corporate Governance* adalah pilar penting untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh. Apalagi dalam operasionalnya bank syariah menggunakan konsep *risk sharing*. Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* untuk kemajuan bank syariah, mesti memerlukan sarana pendukung. Diantara sarana pendukung *corporate governance* yang terpenting adalah kontrol internal, manajemen risiko,

⁵³ Hikmah Endraswati, "Konsep Awal *Islamic Corporate Governance*: Peluang Penelitian yang Akan Datang", *Jurnal Muqtasid*, Volume 6 Nomor 2, (Desember 2015), h. 93-96.

transparansi, akuntansi dan *disclosure* pembiayaan, pemurnian dan audit syariah, regulasi dan pengawasan yang *prudent*.⁵⁴

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah berlandaskan pada lima prinsip dasar :

- 1) *Shiddiq* berarti memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang menjauhi (*Syubhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).
- 2) *Tabligh* berarti secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
- 3) *Amanah* berarti menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shohibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).
- 4) *Fathanah* berarti memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan

⁵⁴ Fathan Budiman, "Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Muqtasid* Volume 7 Nomor 2, (Desember 2016), h. 3-4

keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).⁵⁵

Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan *Good Corporate Governance* pada bank syariah, antara lain:

- 1) Sistem pembagian intern;
- 2) Manajaemen risiko;
- 3) Ketentuan yang mengarahkan pada peningkatan keterbukaan informasi;
- 4) Sistem akuntansi;
- 5) Mekanisme jaminan kepatuhan syariah
- 6) Audit ekstern.⁵⁶

5. Dewan Pengawas Syariah

a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas.⁵⁷ Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah

⁵⁵ Aldira Maradita, “Karakteristik *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, No. 2, (Mei- Agustus 2014), h. 194-195.

⁵⁶ Nasirwan Ilyas, *Seputar Isu Corporate Governance dalam Bank Syariah* (Jakarta: : Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, 2006), h. 20.

⁵⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h.

(habluminallah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.⁵⁸

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.⁵⁹ Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah.⁶⁰

b. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Sebelum didirikan DSN, DPS (Dewan Pengawas Syariah) berfungsi sebagai lembaga fatwa dari bank syariah atau dapat dikatakan bahwa industri keuangan syariah Indonesia pernah memiliki periode dimana DPS yang menjadi bagian internal bank, juga memiliki wewenang

⁵⁸ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 24.

⁵⁹ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16.

⁶⁰ Karnaen A.Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h.2

untuk mengeluarkan fatwa seperti yang dilakukan oleh industri keuangan syariah Negara lain. Pada masa sekarang, wewenang ini dimiliki oleh otoritas fatwa yang independen yaitu DSN yang merupakan bagian dari MUI. Dewan Syariah Nasional merupakan salah satu lembaga yang dibentuk dan merupakan salah satu perangkat kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana disebutkan dalam peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. DPS bertugas mengawasi agar bank tersebut berjaalan pada koridor syariah termasuk dalam hal mengeluarkan fatwa. Pembentukan DPS dilakukan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama, yaitu MUI. Inilah yang menjadi dasar regulasi pertama bagi MUI mendirikan DSN.⁶¹

c. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar hukum Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah swt termasuk dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 9 : 105 :

⁶¹Darsono, Ali Sakti, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 68 – 69.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : “dan katakanalah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang mu'min akan melihat perkerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. AT-Taubah,9: 105).⁶²

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia :

- 1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (CV. Penerbit J-ART : Bandung, 2005), h. 203.

berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).⁶³

d. Tugas dan tanggung jawab DPS secara rinci meliputi :

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasi dan produk yang dikeluarkan bank.
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank.
- 3) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
- 4) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
- 5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.⁶⁴

e. Fungsi Utama Dewan Pengawas Syariah

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

⁶³“ Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah dan lampiran” (Online), tersedia di https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_81906.aspx (16 Juni 2020)

⁶⁴ Tim OJK, *Industri Jasa Keuangan Syariah Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi* (Jakarta: 2019), h. 106-107.

- 2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional (DSN).
- 3) DPS melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.⁶⁵

f. Syarat – Syarat Menjadi Dewan Pengawas syariah

Untuk menjadi DPS, pemohon wajib memenuhi syarat-syarat menjadi anggota DPS, diantaranya:

- 1) Integritas yang paling kurang mencakup
 - a) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - c) Memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
 - d) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Kompetensi yang setidaknya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan keuangan secara umum.

⁶⁵ Wirnyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005). H.83

3) Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:

- a) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet
- b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham.

Anggota dewan komisaris, atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.⁶⁶

6. *Financial Distress*

a. Pengertian *Financial Distress*

Financial Distress didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. *Financial Distress* dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas. Permasalahan terjadinya *insolvency* bias timbul karena faktor berawal dari kesulitan likuiditas.⁶⁷

Financial Distress terjadi sebelum kebangkrutan. Model *financial distress* perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi *financial distress* perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan – tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada prediksi kebangkrutan perusahaan, tetapi hanya sedikit penelitian yang berusaha untuk memprediksi *financial distress* suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan sangat sulit mendefinisikan secara obyektif permulaan

⁶⁶ Ibid, h. 107.

⁶⁷ Irham Fahmi, Analisis Laporan Keuangan, (Bandung : Penerbit Alfabeta), 2011, h 157

adanya *financial distress*. Rasio analisis tradisional berfokus pada profitabilitas, *solvency* dan likuiditas. Perusahaan yang mengalami kerugian, tidak dapat membayar kewajiban atau tidak likuid mungkin memerlukan restrukturisasi. Untuk mengetahui adanya gejala kebangkrutan diperlukan suatu model untuk memprediksi *financial distress* untuk menghindari kerugian dalam nilai investasi.⁶⁸

Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah kegunaannya untuk meramal kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan.⁶⁹ *Financial distress* merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau kritis. *Financial distress* terjadi sebelum kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri biasanya diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban debitor karena perusahaan mengalami kebangkrutan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat dicapai yaitu *profit*, sebab dengan laba yang diperoleh perusahaan biasa digunakan untuk mengembalikan pinjaman, bisa membiayai operasi operasi perusahaan dan kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi bias ditutup dengan laba atau aktiva yang dimiliki. Model *financial*

⁶⁸Melan Rohmaniah dan Hendro Wibowo, “Analisis Potensi Terjadinya *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, (April 2015),h. 5.

⁶⁹Heryetti, “Analisis *Financial Distress* Untuk Memprediksi Risiko Kebangkrutan Perusahaan (Studi Kasus pada Industri Perbankan di BEI)”, *Jurnal Ekonomi*, Volume 18 Nomor 2, (Juni 2010), h. 27.

distress perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi *financial distress* perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi yang mengarah kepada kebangkrutan.⁷⁰

b. *Analisis Financial Distress*

Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan (tanda-tanda awal kebangkrutan). Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Pihak kreditur dan juga pihak pemegang saham yang bisa melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan terburuk. Tanda-tanda kebangkrutan dalam hal ini dilihat dengan menggunakan data-data akuntansi.⁷¹

c. *Penyebab Financial Distress*

Beberapa penyebab terjadinya *financial distress* adalah sebagai berikut:

1) *Neoclassical Model*

Financial distress terjadi ketika alokasi sumber daya tidak tepat. Mengestimasi kesulitan dilakukan dengan data neraca dan laporan laba rugi.

⁷⁰ Melan Rohmaniah dan Hendro Wibowo, "Analisis Potensi Terjadinya *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, (April 2015, h.6).

⁷¹ M Mamduh Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), h. 63.

2) *Financial Model*

Financial distress ditandai dengan adanya struktur keuangan yang salah dan menyebabkan batasan likuiditas (*liquidity constraints*). Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang, namun demikian perusahaan tersebut harus bangkrut juga dalam jangka pendek.

3) *Corporate Governance Model*

Financial distress menurut *corporate governance* model adalah ketika perusahaan memiliki susunan aset yang tepat dan struktur keuangan yang baik namun dikelola dengan buruk.⁷²

7. Bank Syariah

Bank islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad. Dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.⁷³

⁷²Pramuditya, A.Y. (2014). “Analisis Pengaruh Penerapan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kemungkinan Perusahaan Mengalami Kondisi Financial Distress (studi empiris pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2012)”, Skripsi, Program Sarjana (SI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

⁷³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2014, h.2

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pengkreditan Syariah.

Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain, asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam yang memiliki karakteristik antara lain :

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*);
- c. Konsep uang adalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas;
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, dan
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.⁷⁴

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman, karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil, sehingga dalam kegiatan usahanya dapat

⁷⁴ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia), 2002, h. 1-2.

melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Disamping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷⁵

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini :

- a. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman;
- b. Bukan riba;
- c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
- d. Tidak ada penipuan;
- e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan dan
- f. Tidak mengandung unsur judi.⁷⁶

Jenis- jenis perbankan menurut Undang-undang nomor 7 tahun 1992 (pasal 5) adalah :

- a. Bank umum , yaitu adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Pengkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu.

⁷⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 5.

⁷⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002), h. 6.

Sedangkan di dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (pasal 1) terdapat jenis-jenis perbankan syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dan kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.⁷⁷

Dikategorikan Bank Umum Syariah jika seluruh struktur organisasi bank tersebut tunduk pada ketentuan syariah, atau dalam tingkatan bank umum dimana seluruh kegiatannya menjalankan prinsip syariah, baik dari kantor pusat sampai dengan kantor layanan paling bawah dari entitas tersebut seluruhnya melaksanakan kegiatan syariah.

Sampai dengan tahun 2017 yang dikategorikan sebagai Bank Umum Syariah adalah:

- a. Bank Muamalat Indonesia (BMI),

⁷⁷ Wiroso, *Memahami Prinsip Dasar Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jagakarsa : Risalah Perbankan Syariah , 2018), h. 23.

- b. Bank Syariah Mandiri (BSM), hasil konversi Bank Susila Bhakti
- c. Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), hasil konversi Bank Tugu.
- d. Bank Syariah Bukopin (Bukopin Syariah) yang merupakan konversi dari Bank Perserikatan Indonesia, dan gabungan Unit Usaha Syariah Bukopin.
- e. Bank Syariah BRI (BRI Syariah) yang merupakan konversi dari Bank Jasa Artha dan gabungan Unit Usaha Syariah BRI.
- f. Bank Syariah Panin (Panin Syariah) yang merupakan konversi dari Bank Arva.
- g. Bank Syariah Victoria (Victoria Syariah) yang merupakan konversi Bank Swaguna.
- h. Bank Syariah BCA (BCA Syariah) yang merupakan konversi Bank UIB.
- i. Bank Syariah Jabar Banten (BJB Syariah) yang merupakan pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Jabar Banten.
- j. Bank Syariah BNI (BNI Syariah) yang merupakan pemisahan Unit Usaha Syariah Bank BNI
- k. Maybank Syariah yang merupakan konversi dari bank Maybank konvensional Bank BTPN Syariah yang merupakan konversi dari Bank Sahabat Purba Dana Arta.

1. Bank BPD Aceh Syariah yang merupakan konversi dari Bank BPD Aceh Konvensional Bank BPD NTB Syariah yang merupakan konversi dari Bank BPD NTB Konvensional.⁷⁸

8. Model Bankometer

Pengembangan model bankometer dilakukan untuk mengukur kerentanan lembaga keuangan dan membuktikan bahwa model bankometer lebih baik daripada model konvensional lain seperti CAMEL. Krisis sistem keuangan 2008 hingga 2009 di Negara maju telah menjadi ide utama pengembangan model bankometer ini. Berdasarkan saran dari IMF (*International Monetary Fund*), untuk mengendalikan kerentanan sistem keuangan maka perlu mengembangkan bankometer dengan menggunakan jumlah parameter minimum untuk hasil maksimal yang akurat.⁷⁹

Model bankometer dirancang untuk mendapatkan hasil yang akurat dibandingkan dengan CAMEL yang biasanya dilakukan secara manual dengan pembobotan. Prosedur ini memiliki jumlah parameter kualitas minimum dengan hasil akurat maksimum. Model Bankometer (*S-Score*) digunakan sebagai perhitungan dalam menggambarkan kondisi *financial distress* suatu bank pada periode tertentu dengan 6 rasio keuangan, yaitu : *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Capital to Asset* (CA), *Equity to Asset*

⁷⁸*Ibid*, h.29.

⁷⁹ Sharet, Shah, dan Jamil, *Performance Evaluation of Banking Sector in Pakistan An Application of Bankometer*, *International Journal of Business and Management*, 2010, h. 9.

(EA), *Non Performing Loan* (NPL), *Cost to Income* (CI), dan *Loan to Asset* (LA).⁸⁰

Model bankometer yang dikembangkan dari rekomendasi IMF di tahun 2000 memperhatikan pada penilaian bank yang sama dengan rasio CAMEL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berikut persamaan model bankometer :

$$S\text{-Score} = 1.5*CA + 1.2*EA + 3.5*CAR + 0.6*NPL + 0.3*CI + 0.4*LA$$

Keterangan :

CA : *capital to asset ratio*

EA : *equity to asset ratio*

CAR: *capital adequacy ratio*

NPL : *non performing loan* (subjek dalam penelitian ini adalah bank umum syariah karena itu menggunakan istilah *non performing financing*)

CI : *cost to income*

LA : *loan to asset*

Kriteria kesulitan keuangan (*financial distress*) menurut metode bankometer (*S-Score*) dibagi menjadi tiga kelompok seperti berikut ini:

- a. Nilai *S-Score* " $S \leq 50$ " dengan kategori "*Distress*" artinya Bank mengalami kesulitan keuangan yang dan memiliki risiko tinggi terhadap kebangkrutan.
- b. Nilai *S-Score* " $50 < S \leq 70$ " dengan kategori "*Grey Area*" artinya Bank berpotensi mengalami kesulitan keuangan dan kebangkrutan.

⁸⁰ Budiman T, Herawaty A, dan Kristianti, *Evaluation of Financial Stress of Islamic Banks in Indonesia Using a Bankometer Model*, *Journal of Finance and Banking Review*, 2017, h. 14.

- c. Nilai *S-Score* “ $S > 70$ ” dengan kategori “*Safe*” artinya Bank aman atau tidak mengalami kesulitan keuangan.⁸¹

B. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul Pengaruh GCG dan Jumlah DPS terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 dengan Metode Bankometer. Tujuan adanya kajian ini adalah untuk menghindari adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Untuk itu penulis menjelaskan topik pertumbuhan diantaranya sebagai berikut:

1. Penilaian GCG dan *Size* Serta Pengaruhnya Terhadap *Financial Distress* Menggunakan Model Bankometer jurnal yang diteliti oleh Tri Widiastuty. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh penilaian GCG dan *Size* (Ukuran Bank) terhadap *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 8 bank bank umum syariah. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa hasil dari penelitian GCG tidak berpengaruh positif terhadap *financial distress* dengan menggunakan model bankometer dan *size* (ukuran bank) berpengaruh positif terhadap *financial distress* dengan menggunakan model bankometer. Penilaian

⁸¹ *Ibid*, h. 16.

atas baiknya praktik GCG yang telah dilakukan oleh Bank Syariah seharusnya sejalan dengan kondisi bank yang semakin sehat pula. GCG perlu dilakukan bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban dan peraturan perbankan saja, melainkan menjadi budaya yang baik bagi bank. Bank syariah pun harus memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi potensi kebangkrutan seperti pengelolaan aset dan sebagainya.⁸²

2. Analisis Potensi Terjadinya Financial Distress Pada Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia dalam jurnal yang diteliti oleh Melan Rahmaniah dan Hendro Wibowo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC. Faktor-faktor yang dinilai adalah *Risk Profile*, GCG, *earning* dan *capital*. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan tahunan tiga Bank Umum Syariah (BUS) Pada tahun 2011 sampai 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif* kuantitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada tahun 2011 hingga 2013 dari ketiga BUS tidak ada yang dinyatakan tidak sehat dan tidak berpotensi terjadinya *high financial distress*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketiga BUS tersebut mengalami penurunan dalam kinerja *earning* yang diukur dari rasio ROA dan ROE dan risiko likuiditasnya yaitu rasio FDR, akan tetapi penurunan kinerja tersebut tidak berpengaruh signifikan dan tidak

⁸²Tri Widiastuty, "Penilaian GCG dan Size serta Pengaruhnya Terhadap *Financial Distress* Menggunakan Model Bankometer", *Jurnal ISEI Accounting Review*, Volume II, No.1, (Maret, 2018), s h.32.

menyebabkan masing-masing BUS mengalami potensi *high financial distress*. Bank syariah Mandiri dari tahun 2011, 2012, dan 2013 dengan metode RGEC mengalami tingkat kesehatan yang sehat dan tidak mengalami potensi *high financial distress*.⁸³

3. Pengukuran Tingkat Kesehatan dan Gejala *Financial Distress* Bank Umum Syariah dalam jurnal yang diteliti oleh Muhamad Nadratuzzuman Hosen dan Shofaun Nada. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur, menganalisis, serta membandingkan tingkat kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) dengan menggunakan metode CAMELS dan metode *Multiple ECR*. Faktor *asset* terdiri dari rasio KAP dan NPF, faktor *earning* mencakup rasio NOM, ROA, dan ROE serta faktor terakhir *liquidity* mencakup rasio STM dan STMP. Sedangkan pada *Multiple Discriminant Analysis* (MDA) Altman Z-score. Hasil perhitungan dan penilaian tingkat kesehatan bank syariah menggunakan faktor CAMEL (*capital, assets, earning dan liquidity*) menunjukkan bahwa ketiga bank syariah yang menjadi objek penelitian tergolong sehat. Dengan kondisi di mana Bank Syariah Mandiri selama empat tahun konsisten berada dalam kategori cukup sehat. Sementara hasil perhitungan dengan menggunakan metode *Multiple Discriminant Analysis* (MDA) Altman Z-Score terhadap tiga sampel bank syariah memberikan hasil bahwa seluruh bank tergolong bangkrut di setiap tahun nya, yaitu periode 2007-2010. Oleh karena

⁸³ Melan Rahmaniah dan Hendro Wibowo, "Analisis Potensi Terjadinya Financial Distress pada Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3. No. 1, (April 2015), h 19.

itu, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan hasil penilaian dari kedua metode tersebut.⁸⁴

4. Pemetaan Tingkat Kesulitan Keuangan Bank Syariah Di Indonesia dalam jurnal yang diteliti oleh Menurut Muhammad Iqbal, Selamat Riyadi, Priska Sabrianti, dan Afifah Nur Afidah. penelitian ini melihat seberapa besar tingkat kesulitan keuangan yang terjadi pada bank syariah di Indonesia. Data penelitian ini ditunjukkan untuk memetakan keberagaman tingkat kesulitan keuangan bank syariah serta mencoba membandingkan beberapa metode penilaian kesulitan keuangan bank yang ada pada bank syariah. Pengukuran tingkat kesulitan keuangan menggunakan tiga metode yang berbeda, yaitu: metode Altman Modifikasi, Bankometer dan *Risk Based Bank Rating*. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan sampel sebelas Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2010-2016. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bank syariah di Indonesia tidak terindikasi mengalami kesulitan keuangan, namun tetap berpotensi mengalami kesulitan keuangan dengan tingkat kesulitan keuangan yang berbeda antara satu bank syariah dengan bank syariah lainnya. Penelitian yang dilakukan juga menemukan bahwa ketiga metode pengukuran tingkat kesulitan keuangan yang

⁸⁴ Muhammad Nadrattuzaman Hosen dan Shofaun Nada, "Pengukuran Tingkat Kesehatan dan Gejala *Financial Distress* Bank Umum Syariah". *Jurnal Economia*, Volume 9, Nomor 2 (2013), h. 225.

digunakan pada penelitian ini memberikan hasil yang berbeda dalam mengukur kesulitan keuangan pada bank syariah.⁸⁵

5. Analisis *Financial Distress* Untuk Memprediksi Risiko Kebangkrutan Perusahaan (Studi kasus Pada Industri Perbankan Di BEI) dalam jurnal yang diteliti oleh Haryetti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kebangkrutan perusahaan perbankan berdasarkan analisis *financial distress* dengan 12 rasio keuangan antara lain CAR (*Capital Adequacy Ratio*), KAP (Kualitas Aktiva Produktif, NPL (*Non Performing Loan*), ROA (*Return On Assets*), BOPO (Beban Operasional to Pendapatan Operasional), LDR (*Loan to Deposit Ratio*), NCMCA (*Net Call Money to Current Assets*), GROWTH (Pertumbuhan), EVA (*Economic Value Added*), LM (*Leverage Management*), COD (*Cost Of Debt*), dan ROE (*Return On Equity*). Sampel penelitian terdiri dari 10 bank yang memiliki rata-rata assets diatas 20.000.000 (million Rp) selama tahun 2004-2007. Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah penilaian tingkat kesehatan bank melalui perhitungan rasio keuangan, metode *Statistic Deskriptif analisis Multivariate* dengan *Two-Group Discriminant Analysis*, *Casewise statistic*, dan *Stepwise statistic*. Hasil penelitian menunjukan dengan analisis *financial distress* dapat

⁸⁵ Selamet Riyadi, Priska Sabrianti, dan Afifah Nur Afidah, "Pemetaan Tingkat Kesulitan Keuangan Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Economia*, Volume 14, Nomor 2, (Oktober 2018), h. 138.

diprediksi kemungkinan kebangkrutan dengan ketepatan klasifikasi sebesar 85% dan variabel yang berpengaruh dominan adalah NPL.⁸⁶

6. Menurut Febri Ramdhani pada jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, *Leverage* dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014)” berkesimpulan bahwa jumlah dewan pengawas syariah yang besar besar akan membuat pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank Umum Syariah lebih efektif. Tugas pokok dan *concern* utama dari dewan pengawas syariah adalah dalam hal kepatuhan syariah antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk *Islamic Social Reporting* perusahaan. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa dewan pengawas syariah dalam jumlah yang cukup banyak dengan beragam perspektif, pengalaman, kompetensi baik dalam bidang perbankan dan keuangan, serta keahlian dalam hal hukum islam akan membuat kinerja bank semakin efektif dan dapat mengakibatkan review pada pelaporan perusahaan jadi lebih baik terutama dalam hal tata kelola perusahaan dan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.⁸⁷

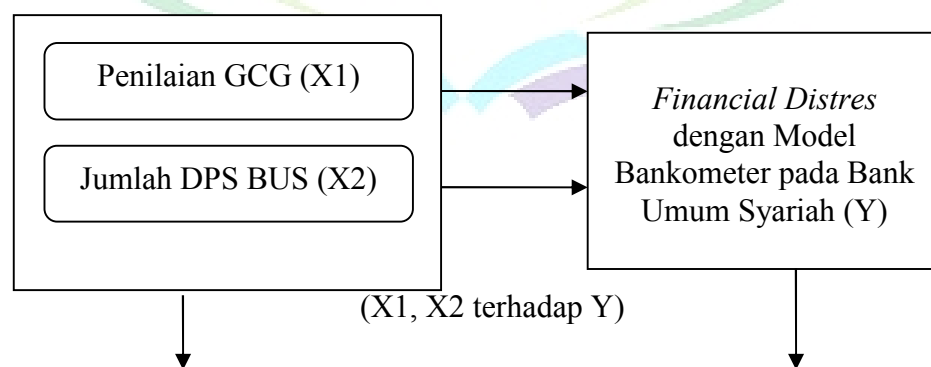
⁸⁶ Haryetti, “Analisis Financial Distress Untuk Memprediksi Risiko Kebangkrutan Perusahaan (Studi kasus Pada Industri Perbankan Di Bei)”, *Jurnal Ekonomi*, Volume 18, Nomor 2 (Juni 2010), h. 32-33.

⁸⁷ Febri Ramdhani, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014)”, *JOM Fekon*, Volume.3 Nomor.1 (Februari 2016), h. 2497

7. Menurut Andari dan Wiksuana (2017) ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress* dimana dengan besarnya ukuran dewan direksi yang dimiliki, maka diharapkan akan semakin baik pula kualitas keputusan yang dihasilkan. Dewan direksi juga merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang diperlukan dalam mengurangi *agency problem* antara pemilik dan manajer agar tercipta keselarasan kepentingan antara principal dan agen.⁸⁸

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir

⁸⁸ Ni Made Meliani Andari dan Gusti Bagus Wiksuana, "RGEC Sebagai Determinasi Dalam Menanggulangi *Financial Distress* pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Volume 6, Nomor 1, (2017), h.139.

Pada penelitian ini untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu penelitian. Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penilaian GCG dan jumlah DPS merupakan variabel bebas (*independen*), sedangkan variabel terikatnya adalah *financial distress*. Diiringi dengan perkembangan industri perbankan syariah yang salah satunya ditandai dengan semakin beragamnya produk-produk dan bertambahnya jaringan pelayanan pada perbankan syariah, maka penilaian GCG atau tata kelola perusahaan yang baik dalam industri perbankan syariah semakin penting untuk dilaksanakan. Dalam perbankan syariah selain penilaian GCG yang harus baik, bank syariah perlu juga didukung oleh DPS (dewan pengawas syariah) yang bertanggung jawab setra kompeten dalam mengawasi jalannya operasional bank syariah. Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki wewenang melakukan banyak aktivitas tentunya memiliki risiko yang melekat. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi dan dikelola sedini mungkin, berbagai risiko tersebut bisa berupa penurunan tingkat kesehatan bank, kesulitan keuangan (*financial distress*) hingga risiko kebangkrutan.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁸⁹

Berdasarkan latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian dan landasan teori yang ada, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Penilaian GCG terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 dengan model Bankometer

Corporate Governance sangat erat kaitannya dengan teori agensi. Inti dari hubungan keagenan adalah terdapat pemisah antara kepemilikan dan pengelola perusahaan. Pengelola perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memperkecil asimetris informasi serta kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jika bank sudah dikelola dengan baik dari sisi keuangan maupun non keuangannya maka dapat mengurangi risiko kebangkrutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penilaian GCG maka bank akan semakin sehat (nilai *financial distress* dengan model bankometer semakin tinggi). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Penilaian GCG berpengaruh positif terhadap *Financial Distress*.

⁸⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 93.

H_0 : Penilaian GCG tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress*.

2. Pengaruh Jumlah DPS terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 dengan model Bankometer

Pengawasan yang ketat dapat mengurangi *agency cost*. Jumlah DPS yang semakin banyak yang dimiliki oleh suatu bank syariah diharapkan akan menghasilkan keputusan yang lebih baik, karena melibatkan lebih banyak pihak, jadi semakin banyak jumlah DPS membuat perusahaan berkinerja yang baik dan sehingga membuat perusahaan terhindar dari kondisi *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_2 : Jumlah DPS berpengaruh positif terhadap *Financial Distress*.

H_0 : Jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress*.

3. Pengaruh Penilaian GCG dan Jumlah DPS terhadap *Financial Distress* Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 dengan model Bankometer

Penilaian GCG merupakan salah satu bagian terpenting dari tata kelola perusahaan. Jumlah DPS yang merupakan bagian dari penerapan GCG sangat berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik, dengan demikian diharapkan dengan penilaian GCG yang tinggi dan dengan jumlah DPS yang banyak akan menekan kondisi *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Akal, Muhammad Nasrum, *Corporate Governance, (Konsep, Teori dan Perbandingan Pelaksanaan Beberapa Negara Asia)*, (Maros, 2014), h. 10. Mengutip Tjager et.al, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta: PT.Prenhallindo, 2003
- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teor ke Praktik*, Jakarta: Gema Isnani, 2007.
- Darsono, Ali Sakti, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana dan Jajajng Bazruzaman, *Good Corporate Governance*, Tasikmalaya : LPPM Siliwangi, 2015.
- Eliza, Any, *Analisa Peringkat Good Corporate Governance (GCG) Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya di Indonesia dan pengaruhnya terhadap Risiko Bank*, Lampung: Permatanet, 2015.
- Fahmi, Irham, *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011.
- Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002.
- Ilyas, Nasirwan, *Seputar Isu Corporate Governance dalam Bank Syariah*, Jakarta: : Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, 2006.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Karnaen A.Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

M Mamduh Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.

Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: Rfika Aditama, 2011.

Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2007.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Najmuddin. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, Yogyakarta: 2011.

Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011.

Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) Jilid II Edisi 2, Jakarta : Forum for corporate Governance in Indonesia (FGCI), 2001.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Solihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility from Charity to Substantly*, Jakarta : Salemba Empat, 2008

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012

Suprayitno, G dkk, *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance*, Jakarta : The IICG, 2004.

Sutedi, Adrian, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tim OJK, *Industri Jasa Keuangan Syariah Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Jakarta: 2019.

Widyaningsih, et. al. *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007.

Wirdyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesi*, Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005.

Wiroso, *Memahami Prinsip Dasar Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jagakarsa : Risalah Perbankan Syariah, 2018.

Jurnal

Aldira Maradita, “Karakteristik *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, No. 2, Mei- Agustus 2014.

Angrum Pratiwi, “Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2015)”, *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, (2016), h. 56, Mengutip Tangkilisan, Hessel Nogi S, Mengelola Kredit Berbasis *Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Balaiurang, 2003.

Ari Kristin Presetyoningrum, “Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah”. *Jurnal Aset* Vol. 12 No. 1, 2010.

Ayu Alvidianita dan Lucky Rachmawati, “Pengaruh RGEC Terhadap *Financial Distress* Pada Bank Muamalat Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2 Nomor 2, 2019.

Benny Agus Setionoteori, “Perusahaan / Theory Of The Firm : Kajian Tentang Teori Bagi Hasil Perusahaan (Profit And Loss Sharing) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, Volume 5, Nomor 2, Maret 2015.

Budiman T, Herawaty A, dan Kristianti, *Evaluation of Financial Stress of Islamic Banks in Indonesia Using a Bankometer Model*, *Journal of Finance and Banking Review*, 2017.

Fathan Budiman, “Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Muqtasid* Volume 7 Nomor 2, Desember 2016.

- Febby Prianti, "Pengaruh RBEC Dan Variabel Makroekonom Terhadap *Banking Distress* dengan menggunakan CD Indeks di Indonesia". *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 6 Nomor 3, 2018.
- Febry Ramadhani, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014)", *Jom Fekon*, Vol.3 No.1, (2016), h. 249 Mengutip Amirul Khoiruddin, "Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*, 2013.
- Hapsari, "Kekuatan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Kondisi *Financial Distress* Perusahaan Manufaktur Di BEI", *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2012.
- Heryetti, "Analisis *Financial Distress* Untuk Memprediksi Risiko Kebangkrutan Perusahaan (Studi Kasus pada Industri Perbankan di BEI)", *Jurnal Ekonomi*, Volume 18 Nomor 2, Juni 2010.
- Hikmah Endraswati, "Konsep Awal *Islamic Corporate Governance*: Peluang Penelitian yang Akan Datang", *Jurnal Muqtasid*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2015.
- Ma'ul Taufiq, Ade Fatma Lubis, Dan Sri Mulyani, "Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)". *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 7 No. 1, Januari 2014.
- Maria Bhatti & Ishaq Bhatti, "Development in Legal Issue of Corporate Governance in Islamic Finance", *Journal of Economic & Administrative Sciences*, Volume 25 No. 1, 2009.
- Melan Rahmaniah dan Hendro Wibowo, "Analisis Potensi Terjadinya Financial Distress pada Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3. No. 1, April 2015.
- Mervyn Lewis, "Accountability and Islam", *Conference Paper presented at Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition Adelaide*, Volume 1, 2006.
- Muhammad Nadratuzzaman Hosen dan Shofaun Nada, "Pengukuran Tingkat Kesehatan dan Gejala *Financial Distress* Bank Umum Syariah". *Jurnal Economia*, Volume 9, Nomor 2, 2013.

- Ni Made Meliani Andari dan Gusti Bagus Wiksuana, "RGEC Sebagai Determinasi Dalam Menanggulangi *Financial Distress* pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Volume 6, Nomor 1, 2017.
- Nova novita, Andi Salahudin Akbar, dan Putri Dwi Handayani, "Analisis Kebangkrutan Bank Melalui *Rentabilitas*, *Capital* dan Bankometer : Studi Pada Bank Umum Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, Vol 2 No. 1, 2016.
- Selamet Riyadi, Priska Sabrianti, dan Afifah Nur Afidah, "Pemetaan Tingkat Kesulitan Keuangan Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Economia*, Volume 14, Nomor 2, Oktober 2018.
- Sharet, Shah, dan Jamil, *Performance Evaluation of Banking Sector in Pakistan An Application of Bankometer*, *International Journal of Business and Management*, 2010.
- Syafrudin Arif Marah Manunggal, "Good Corporate Governance dan Manajemen Keuangan dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Muqtasid*, Volume 10, Nomor 2, 2011.
- Teguh Budiman, Aldrin Herwany, dan Farida Titik Kristanti, "Evaluasi Stres Keuangan Bank Islam di Indonesia menggunakan Model Bankometer", *Jurnal Keuangan dan Perbankan Ulasan*, Vol.2 No.3, 2017.
- Tri Widiastuty, "Penilaian GCG dan Size serta Pengaruhnya Terhadap *Financial Distress* Menggunakan Model Bankometer", *Jurnal ISEI Accounting Review*, Volume II, No.1, Maret, 2018.
- Zulkifli Hasan, "Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives", *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5 No. 1, 2009.

Sumber Online

- "Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah dan lampiran" (Online), tersedia di https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_81906.aspx (16 Juni 2020)
- "Data dari Laporan GCG Tahunan" (Online) Tersedia di [https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.php?f=annual,https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami/laporantahunan, https://www.btpnsyariah.com/laporan-tahunan](https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.php?f=annual,https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami/laporantahunan,https://www.btpnsyariah.com/laporan-tahunan) (Diakses pada 20 November 2019).

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (On-line) tersedia di:
<https://kbbi.web.id/nilai> (12 November 2019).

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (On-line) tersedia di
: <https://jagokata.com/arti-kata/jumlah.html> (3 Maret 2020).

“Statistik Perbankan Syariah per Desember 2018” (Online), tersedia di:
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2018.aspx> (diakses pada 20 November 2019).

”Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia “, PT. Bursa Efek Indonesia (On-line) Tersedia di : <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/> (diakses pada 09 Maret 2020).

Sumber Lainnya

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit J-ART : Bandung, 2005.

Pramuditya, A.Y. (2014). “Analisis Pengaruh Penerapan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kemungkinan Perusahaan Mengalami Kondisi Financial Distress (studi empiris pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2012)”, Skripsi, Program Sarjana (SI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (3 dan 4).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal ayat (12).